

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

KURNIATI MANSYUR



**DEPAARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh :

**KURNIATI MANSYUR
A111140190**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

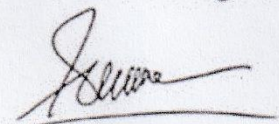
disusun dan diajukan oleh :

KURNIATI MANSYUR
A11114019

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

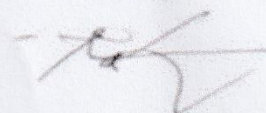
Makassar, **27 Agustus 2021**

Pembimbing I



Prof. Dr. Nursini, SE., MA.
Nip : 19660717 199103 2 001

Pembimbing II



Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF.
Nip : 19681221 199512 1 001



Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®.
Nip 19690413 199403 1 003

SKRIPSI

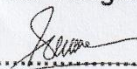
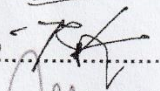
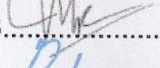
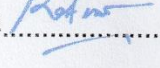
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

KURNIATI MANSYUR
A11114019

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **27 Agustus 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Nursini, SE.,MA.	Ketua	1..... 
2. Dr. Hamrullah, SE.,M.Si.,CSF.	Sekretaris	2..... 
3. Dr. Madris, DPS.,M.Si.,CWM®.	Anggota	3..... 
4. Dr. Retno Fitrianti, SE.,M.Si.	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Drs. Sanusi Fattah, SE.,M.Si.,CSF.,CWM®.
Nip. 19690413 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **KURNIATI MANSYUR**

Nomor Pokok : A11114019

Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UNHAS

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan***, adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, 27 Agustus 2021



(Kurniati Mansyur)

No. Pokok : **A11114019**

PRAKATA

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang tiada henti-hentinya memberikan limpahan rahmat, dan hidayah-Nya, serta atas izin-Nya pulalah sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISI PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Usaha dan upaya telah peneliti kerahkan secara maksimal dalam penulisan skripsi ini, tetapi peneliti mengakui bahwa skripsi ini tidak akan mampu terbit tanpa bantuan dan dukungan dalam segala hal. Terimakasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya secara khusus peneliti ucapkan kepada Hj. St. Sunggu Dg Sakking selaku tante rasa ibu yang telah membesarkan, mendoakan, mendukung dan membiayai peneliti sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana, terimakasih juga peneliti ucapkan kepada kedua orang tua peneliti Mansyur Naro dan Rahmawati Hamzah (almarhumah), saudara/i, Ciang selaku sepupu serta Isman selaku suami dan Abdullah Alfarizki selaku anak peneliti, yang tak henti-hentinya mendoakan peneliti agar senantiasa dalam kebaikan, memberikan dukungan, dan mencurigai peneliti terlalu santai sehingga masa studi harus bertambah beberapa semester, serta segala jenis tekanan dan desakan sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dalam kesempatan ini, peneliti juga merasa wajib hukumnya menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga atas bantuan beberapa pihak, yakni kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®. dan Ibu Dr. Dwiana Sari Saudi, SE. M.Si. selaku ketua dan sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas beserta jajarannya. Terima kasih atas segala nasehat dan bantuan yang telah diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
4. Bapak Prof. Marsuki, DEA, Ph.D. selaku Penasehat Akademik peneliti. Terima kasih atas segala nasehat dan arahan yang telah diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
5. Ibu Prof. Dr. Nursini, S.E., M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF. selaku Pembimbing II. Terima kasih telah bersedia dan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Dosen penguji: Bapak Dr. Madris, DPS., M.Si., CWM®. Dan Ibu Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan serta saran dan kritik yang diberikan kepada peneliti demi kelayakan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi yang telah menginspirasi dan bersedia membagi ilmunya kepada peneliti, terima kasih atas pembelajaran dan bantuan selama masa kuliah peneliti.
8. Segenap Pegawai Akademik, Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah membantu dalam pengurusan administrasi selama masa studi peneliti.
9. Pimpinan dan seluruh karyawan(i) Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan sumbangsih berupa penyediaan data dalam penyusunan skripsi ini
10. Seluruh peneliti terdahulu yang telah disebutkan dalam daftar pustaka skripsi ini, terima kasih telah memberikan modal intelektual sebagai sumbangsih yang begitu besar dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman PRIMES (Angkatan 2014 Ilmu Ekonomi) selaku teman yang telah banyak memberi pengalaman, kenangan yang begitu berarti bagi peneliti, meskipun peneliti jarang sekali berkumpul dengan kalian tapi percayalah kalian telah memberi warna selama proses perkuliahan ini. Maaf jika peneliti terlalu cuek dan banyak kesalahan selama ini.

12. Terima kasih untuk Irna, Liska, Reski MR, dan Asty yang merupakan teman terdekat selama masa perkuliahan dan telah menyemangati dan membantu peneliti yang super malas ini hingga skripsi ini selesai.
13. Buat teman-teman ku : Rahayu, Imam, Relita, Umi, Indah, Icca, Uci, Asma, Rura, Sukma, Anty Belopa, Nabila, Saroh, dan Rika. Terima telah memberi warna pada masa perkuliahan peneliti.
14. Terima kasih juga buat teman-teman KKN Gel. 96 Pol-Sel Kab. Takalar, khususnya Kelurahan Bontokadatto.
15. Untuk Himajie Unhas, terima kasih sudah menjadi tempat belajar bagi peneliti selama ini.
16. Dan tentunya semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang telah membantu kelancaran skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama yang ingin melanjutkan ataupun memperbaiki tulisan yang terkait dengan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 27 Agustus 2021

Kurniati Mansyur

ABSTRAK

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Analysis of the Influence of Economic Growth, Investment and Government Expenditure on Inequality in Regional Development of South Sulawesi Province

Kurniati Mansyur
Nursini
Hamrullah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisa pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Temuan dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengeluaran pemerintah dapat memberikan pengaruh yang bermakna dengan rendahnya ketimpangan pembangunan wilayah di Sulawesi Selatan.

Kata Kunci : Pertumbuhan ekonomi, investasi, pengeluaran pemerintah, ketimpangan pembangunan

The purpose of this study is to measure and analyze the effect of economic growth, investment and government spending on regional development inequality in South Sulawesi Province. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The findings of this study are that economic growth has a positive and insignificant effect on regional development inequality in South Sulawesi Province. Investment has a negative and significant impact on regional development inequality in South Sulawesi Province. Government spending can have a significant impact on the low inequality of regional development in South Sulawesi.

Keywords: Economic growth, investment, government spending, development inequality

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.....	11
2.1.2. Konsep Wilayah dan Pembangunan Wilayah.....	12
2.1.3. Ketimpangan Pembangunan Wilayah	17
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi.....	20
2.1.5. Investasi	22
2.1.6. Pengeluaran Pemerintah	24
2.1.7. Hubungan antar Variabel	26
2.2. Studi Empiris	31
2.3. Kerangka Konseptual	34
2.4. Hipotesis Penelitian	36

BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Rancangan Penelitian	38
3.2. Lokasi Penelitian	38
3.3. Metode Pengumpulan Data	38
3.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	38
3.5. Metode Analisis Data.....	39
3.6. Definisi Operasional Variabel	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 45
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.1.1 Kondisi Geografis	45
4.1.2 Kondisi Demografis	45
4.1.3 Kondisi Perekonomian	46
4.1.4 Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan	47
4.2. Hasil Penelitian	48
4.3. Pembahasan	60
 BAB V PENUTUP	 63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran-saran	64
 DAFTAR PUSTAKA	 65
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Indeks Williamson dan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019.....	3
1.2. Investasi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019.....	7
1.3. Data Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019.....	8
4.1. Data Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Ketimpangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019.....	49
4.2. Perubahan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019.....	49
4.3. Pertumbuhan Investasi PMDN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019.....	50
4.4. Pertumbuhan Tingkat Pengeluaran Pemerintah Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005–2019.....	51
4.5. Statistik Deskriptif	52
4.6. Uji Normalitas dengan One Sample Kolmogorov Smirnov Test.....	53
4.7. Hasil Uji Multikolinearitas	54
4.8. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	55
4.9. Hasil Uji Autokorelasi	56
4.10. Hasil Olahan Data Regresi	56
4.11. Uji Korelasi dan Koefisien Determinasi	57
4.12. Hasil Uji Anova	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Konseptual	35
4.1. Pertumbuhan Ekonomi atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2016	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketimpangan pada dasarnya menimbulkan suatu masalah pembangunan dalam suatu wilayah yang akan berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang berujung kemiskinan dalam wilayah tersebut. Adanya wilayah yang memiliki faktor-faktor produksi yang lebih dan posisi yang sangat strategis akan mendukung wilayah tersebut berproduksi lebih banyak dibanding wilayah lain. Hal ini akan mendorong wilayah tersebut akan banyak menyerap investasi di daerah tersebut.

Ketimpangan pembangunan wilayah merupakan suatu keadaan dimana adanya perbedaan kondisi wilayah antara wilayah yang maju dan wilayah terbelakang. Terjadinya perbedaan ini dikarenakan daerah yang terbelakang belum mampu memaksimalkan potensi dalam daerah tersebut dan kurangnya sumber daya yang dimiliki sehingga terjadi jarak antara daerah yang maju dan terbelakang. Akibat dari perbedaan ini kemampuan suatu wilayah dalam mendorong proses pembangunan pastinya akan berbeda. Di satu sisi ada wilayah yang pembangunannya relatif lebih meningkat, di sisi lain ada wilayah yang pembangunannya relatif tetap pada suatu titik. Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah akan mendorong terciptanya kemiskinan di suatu wilayah akibat dari pembangunan yang semakin terpusat di suatu wilayah dan semakin banyaknya pembangunan yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat.

Ketimpangan merupakan aspek yang sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan di suatu wilayah, yang diharapkan bisa mengatasi

kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan yang merata dan pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah suatu idealitas yang diharapkan oleh setiap wilayah untuk bisa bersaing dengan wilayah yang lainnya.

Provinsi Sulawesi Selatan terbagi dalam 24 kabupaten/kota dengan tingkat pembangunan yang berbeda-beda dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya, hal ini dikarenakan bahwa setiap kabupaten/kota memiliki perbedaan potensi baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan kualitas teknologi yang dimiliki setiap kabupaten/kota. Perbedaan ini akan menyebabkan suatu wilayah ada yang akan tumbuh relatif cepat dan ada juga yang relatif lambat, inilah salah satu penyebab yang akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Pembangunan yang begitu cepat dan terpusat di kota akan berdampak pada terjadinya kecemburuan sosial antara satu wilayah dengan wilayah lain. Wilayah yang relatif maju didukung oleh adanya potensi yang ada dalam wilayah tersebut untuk bisa mengeksplorasi sumber daya yang ada. Dimisalkan bagi para investor yang ingin menanamkan modal di wilayah tersebut pastinya investor akan memberikan modal kepada wilayah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang.

Pembangunan di suatu wilayah dikatakan berhasil apabila dibarengi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun pertumbuhan ekonomi tersebut berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, pada tahun 2018

pertumbuhan ekonomi berada di angka 7,07%, angka tersebut jauh di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,17%. Namun, dibalik tingginya pertumbuhan ekonomi, terdapat ketimpangan yang cenderung meningkat di Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini dapat dilihat dari indeks Williamson yang berguna untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan membandingkan antara PDRB perkapita dengan jumlah penduduk wilayah tersebut.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan data indeks Williamson dan Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dalam 10 tahun terakhir yakni dari tahun 2010-2019 yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Indeks Williamson dan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019

Tahun	Indeks Williamson	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2010	0,70	8,19
2011	0,68	7,61
2012	0,68	8,37
2013	0,68	7,84
2014	0,60	7,57
2015	0,60	7,19
2016	0,66	7,41
2017	0,62	7,23
2018	0,70	7,07
2019	0,60	6,92

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (data diolah)

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2010-2019 sangat berfluktuasi, dari tabel 1.1, terlihat bahwa pada tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7,61% menurun drastis dari tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2012 justru laju pertumbuhan kembali meningkat sebesar 8,37% dari tahun sebelumnya, kemudian laju pertumbuhan kembali melambat pada tahun 2013 sebesar 7,84%. Begitu pula pada tahun 2014-2015, sedangkan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 7,41%, dan pada tahun 2015-2018 mengalami penurunan, terlebih lagi pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi

Sulawesi Selatan melambat di tahun 2019, hanya bertumbuh sebesar 6,92%, yang merupakan angka terendah sedikitnya dalam satu dekade terakhir. Tapi kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak selalu dibarengi dengan menurunnya Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan. Indeks Williamson dari tahun 2010-2017 tergolong fluktuasi dikisaran 0,60-0,70. Sehingga dari data nilai indeks tersebut dapat diklasifikasikan dalam kriteria ketimpangan tinggi.

Syafrizal (2008) mengatakan terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi akan mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal yang sebaliknya juga berlaku, bilamana konsentrasi ekonomi suatu wilayah rendah maka akan mendorong terjadinya pengangguran dan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah sehingga menyebabkan kemiskinan. Ketimpangan yang terjadi pada wilayah disebabkan oleh keberagaman faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh setiap orang dalam suatu wilayah. Semakin banyak faktor produksi yang dimiliki oleh seseorang, maka berkemungkinan besar ia akan memiliki pendapatan yang semakin besar. Apabila suatu wilayah memiliki ketidakmerataan pendapatan atau ketimpangan yang besar, maka akan menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas, dan kesenjangan sosial.

Ketimpangan pembangunan merupakan persoalan yang seringkali terjadi dalam suatu wilayah, sebab persoalan ini telah menjadi sebuah gejala ekonomi maupun sosial di hampir setiap wilayah sebab terjadinya ketimpangan merupakan efek dari pembangunan ekonomi. Pembangunan yang idealnya mendorong pertumbuhan dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata tetapi kenyataannya malah menimbulkan ketimpangan.

Ketimpangan wilayah dicirikan dengan adanya daerah yang lebih maju dan ada daerah yang terbelakang. Masalah ketimpangan menjadi persoalan besar dalam beberapa tahun belakangan ini yang disebabkan karena ada beberapa

negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat tetapi ketimpangan antar wilayahnya semakin melebar, karena untuk proses pembangunan terdapat beberapa perbedaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh setiap wilayah, dimana ada wilayah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, tetapi kurang dalam Sumber Daya Manusia (SDM). Begitu pula sebaliknya ada wilayah yang kurang SDA, tetapi SDMnya melimpah atau banyak. Sehingga dengan adanya keadaan ini selanjutnya menyebabkan perbedaan dalam perkembangan pembangunan yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan di masing-masing wilayah menjadi lebih stabil.. Inilah yang kemudian akan memicu meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah dikarenakan wilayah tersebut mempunyai potensi untuk berkembang.

Alokasi investasi yang terkonsentrasi pada wilayah tertentu mengakibatkan investasi menjadi tidak merata pada suatu wilayah tersebut. Hal itu dikarenakan investor lebih memilih menanamkan modalnya di wilayah yang berfasilitas baik, struktur jalannya baik dan juga pendidikannya jauh lebih baik dari wilayah yang masih terbelakang. Hal yang demikian membuat wilayah tersebut lebih berpotensi untuk mendapatkan investor dan bahkan wilayah yang tidak mendapat penanaman modal akan tertinggal dari wilayah lain.

Jhingan (2014) menjelaskan terdapat banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dampak balik pada suatu wilayah, dimana salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan suatu wilayah adalah investasi. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Sedangkan, wilayah terbelakang lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan

kelangkaan modal. Kelangkaan modal ini akan menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dengan wilayah terbelakang.

Myrdal dalam Islami dan Nugroho (2018) mengungkapkan bahwa investasi akan menyebabkan terjadinya ketimpangan. Hal ini disebabkan karena tidak semua kabupaten/kota menjadi sasaran investasi. Investasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan investasi pemerintah diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sunariyah (2014) investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Penanaman modal yang dilaksanakan dengan tepat dan dalam jangka waktu panjang mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Penanaman modal atau investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dapat menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan pembangunan baik itu berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi swasta mempunyai peranan penting untuk meningkatkan perekonomian suatu wilayah melalui penyerapan tenaga kerja pada wilayah tersebut. Akan tetapi, menurut Myrdal dalam Jhingan (2014) mengungkapkan bahwa investasi akan menyebabkan terjadinya ketimpangan. Hal ini disebabkan karena tidak semua kabupaten/kota menjadi sasaran investasi. Bahkan ada beberapa wilayah yang mempunyai tingkat investasi yang sangat rendah. Para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri hanya menilai wilayah-wilayah yang mempunyai potensi atau keuntungan yang menjanjikan sehingga akan dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas maka dapat disajikan data investasi PMDN Sulawesi Selatan tahun 2010-2019 melalui tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2. Investasi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019

Tahun	Investasi			
	PMA (Juta US\$)		PMDN (Milyar Rp)	
	Jumlah proyek	Realisasi	Jumlah proyek	Realisasi
2010	33	441,80	23	3.212,3
2011	36	89,60	42	3.986,3
2012	29	582,60	34	3.318,9
2013	88	462,80	57	2.921,0
2014	58	280,90	48	4,949,8
2015	165	233,30	244	9,215,3
2016	309	372,50	365	3,334,6
2017	196	712,80	342	1.969,4
2018	191	617,20	318	3.275,9
2019	239	302,60	132	4.672,8
Total	1.344	4.096,10	1.505	40.856,30

Sumber : Badan Penanaman Modal Indonesia, 2021

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa investasi PMDN di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2019, dari data tersebut terlihat bahwa investasi PMDN berfluktuasi, terkadang meningkat dan terkadang pula mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 jumlah PMDN mengalami penurunan yang sangat drastis. Terjadinya penurunan PMDN menandakan bahwa investasi yang kurang dapat menimbulkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain seperti yang dikatakan Myrdal (2014) dalam teorinya mengenai dampak balik yang diakibatkan oleh perpindahan modal dan motif laba yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat pada wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lainnya akan terabaikan. Hal ini menandakan bahwa investasi yang tidak merata pada setiap wilayah menyebabkan kelangkaan modal yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan.

Pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun terlihat bahwa mengalami tren naik, ini mengindikasikan bahwa meningkatnya peranan pemerintah dalam sektor

ekonomi. Dumairy (2007) menyebutkan bahwa pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu tidak hanya untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Ini bukan berarti pemerintah ikut berbisnis, melainkan pemerintah harus berkontribusi menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Berikut ini akan disajikan data pengeluaran pemerintah wilayah Provinsi di Sulawesi Selatan tahun 2010-2019 yang dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3. Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019

Tahun	Pengeluaran Pemerintah	Perubahan	
		RP	(%)
2010	13.991.292.077	-	-
2011	17.265.168.996	3.273.876.919	23,40
2012	18.513.978.056	1.248.809.060	7,23
2013	21.399.398.146	2.885.420.090	15,59
2014	23.085.955.316	1.686.557.170	7,88
2015	27.192.372.962	4.106.417.646	17,79
2016	34.177.482.130	6.985.109.168	25,69
2017	33.151.099.450	-1.026.382.680	-3,00
2018	33.686.416.961	535.317.511	1,61
2019	35.525.303.935	1.838.886.974	5,46
Rata-rata Peningkatan		2.108.084.327	14,39

Sumber: Sulsel Dalam Angka (diolah)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa perubahan pengeluaran pemerintah di Sulawesi Selatan selama tahun 2010-2019, dimana rata-rata peningkatan sebesar 14.39% dimana dalam 10 tahun terakhir tingkat pengeluaran pemerintah meningkat dari tahun ke tahun tapi hanya pada tahun 2017 pengeluaran pemerintah menurun sebesar 3 persen. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan program pemerintah khususnya di sektor kesehatan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan teori dan fakta yang terjadi maka timbullah suatu masalah penelitian. Yang menjadi permasalahan adalah apakah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengukur dan menganalisa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengukur dan menganalisa pengaruh investasi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengukur dan menganalisa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi, investasi dan kemiskinan serta pengaruhnya terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan.
2. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian mengenai pertumbuhan ekonomi, investasi dan kemiskinan serta pengaruhnya terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga bisa menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya terkait dengan masalah yang sama dan bisa dikembangkan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Model Pertumbuhan Neo-Klasik

Model pertumbuhan neoklasik selanjutnya, yaitu model pertumbuhan neoklasik Solow. Pada intinya, model ini merupakan pengembangan dari formulasi Harrod-Domar dengan menambahkan faktor kedua, yakni tenaga kerja, serta memperkenalkan variabel independen ketiga, yaitu teknologi ke dalam persamaan pertumbuhan. Berbeda dengan model Harrod-Domar yang mengasumsikan skala hasil tetap (*constant return to scale*) dengan koefisien baku, model pertumbuhan neo klasik Solow berpegang pada konsep skala hasil yang terus berkurang (*diminishing returns*) dari input tenaga kerja dan modal keduanya dianalisis secara terpisah; keduanya dianalisis secara bersamaan atau sekaligus, Solow juga memakai asumsi skala hasil tetap tersebut (Todaro, 2013).

b. Teori Myrdal Mengenai Dampak Balik

Myrdal dalam Jhingan (2014), berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses, sebab menyebabkan sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effect*) cenderung membesar dan dampak sebar (*spread effect*) semakin mengecil. Semakin kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di negara-negara terbelakang.

c. Aglomerasi

Pertumbuhan ekonomi antar daerah biasanya tidak akan sama. Terdapat daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, akan tetapi disisi lain ada pula daerah yang tingkat pertumbuhannya rendah. Perbedaan daerah dilihat dari pendapatan maupun pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada munculnya aglomerasi, yaitu terpusatnya kegiatan-kegiatan ekonomi pada suatu daerah saja dan tidak terjadi persebaran yang merata.

Montgomery dalam Kuncoro (2006) mendefinisikan aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari aktifitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen untuk meminimisasi biaya-biaya seperti biaya transportasi, informasi, dan komunikasi.

2.1.2 Konsep Wilayah dan Pembangunan Wilayah

Konsep perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan pendekatan wilayah. Menurut Rustiadi et al. (2011) wilayah didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut (sub wilayah) satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sedangkan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Pengembangan konsep wilayah dan penerapannya dalam dunia nyata akan menghasilkan suatu perwilayahan. Pewilayahan digunakan sebagai alat untuk mengolah dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan pewilayahan digunakan untuk penerapan pengelolaan (manajemen) pengelolaan

sumber daya yang memerlukan pendekatan pengelolaan yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan karakteristik secara spesial.

Pembangunan wilayah adalah proses/tahapan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang dalam perwujudannya melibatkan interaksi antara sumber daya manusia dengan sumber daya lain termasuk sumber daya alam dan lingkungan melalui kegiatan investasi pembangunan. Sedangkan tujuan pembangunan wilayah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan memanfaatkan sifat keadaan daerah dan lingkungan yang bersangkutan terutama aspek yang menyangkut sumberdaya fisik dan sosio kultural yang hidup di masing-masing wilayah (Anwar, 2005).

Pengembangan wilayah merupakan program menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada dan memberikan kontribusi pada pembangunan suatu wilayah. Konsep pengembangan wilayah adalah suatu upaya dalam mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dengan penyeimbangan dan penyerasian pembangunan antar daerah, antar sektor serta pelaku pembangunan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Strategi pengembangan suatu wilayah sangat ditentukan oleh karakteristik dan potensi yang terdapat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sebelum melakukan perumusan kebijakan yang dilaksanakan perlu mengetahui tipe/jenis wilayahnya. Dengan mengetahui ciri suatu wilayah, maka dapat dirumuskan kebijakan yang tepat dilakukan dalam pengembangan wilayah. Menurut Tukiyat (2002) secara umum terdapat lima tipe wilayah dalam suatu negara:

- a. Wilayah yang telah maju.
- b. Wilayah netral, yang dicirikan dengan adanya tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi.

- c. Wilayah sedang, yang dicirikan adanya pola distribusi pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif baik.
- d. Wilayah yang kurang berkembang atau kurang maju, yang dicirikan adanya tingkat pertumbuhan yang jauh di bawah tingkat pertumbuhan nasional dan tidak ada tanda-tanda untuk dapat mengejar pertumbuhan dan pengembangan.
- e. Wilayah tidak berkembang.

Sedangkan menurut Anwar (2005) wilayah memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- a. Wilayah maju adalah wilayah yang telah berkembang yang biasanya dicirikan dengan pusat pertumbuhan. Di wilayah ini biasanya ada pemusatan penduduk, industri, pemerintahan dan sekaligus pasar yang potensial. Selain itu juga dicirikan dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, tingkat pendidikan dan kualitas SDM yang juga tinggi. Potensi lokasi yang strategis, sarana pendidikan yang lengkap, dan aksesibilitas yang baik terhadap pasar domestik dan pasar internasional.
- b. Wilayah yang sedang berkembang biasanya dicirikan oleh pertumbuhan yang cepat dan biasanya merupakan wilayah penyangga dari wilayah maju. Potensi SDA yang cukup tinggi, tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi, namun belum terjadi kesesakan dan tekanan biaya sosial. Masih terjadi keseimbangan antara sektor pertanian atau primer lainnya dengan sektor industri. Sektor jasa sudah mulai berkembang, meski perannya masih relatif kecil.
- c. Wilayah yang belum berkembang dicirikan oleh tingkat pertumbuhan yang masih rendah baik secara absolut, maupun secara relatif, namun memiliki potensi SDA yang belum dikelola atau dimanfaatkan. Wilayah ini didiami oleh

kepadatan penduduk yang masih rendah dengan tingkat pendapatan dan pendidikan yang masih rendah juga. Wilayah ini belum memiliki aksesibilitas yang baik terhadap wilayah lainnya. Sektor ekonomi wilayah ini masih didominasi oleh sektor primer dan biasanya belum mampu membiayai pembangunan secara mandiri.

- d. Wilayah yang tidak berkembang dicirikan oleh dua hal yaitu : (1) Wilayah tersebut memang tidak memiliki potensi baik potensi sumber daya alam atau lokasi sehingga secara alamiah sulit sekali berkembang dan mengalami pertumbuhan; dan (2) Wilayah tersebut sebenarnya memiliki potensi, baik sumber daya alam atau lokasi maupun memiliki keduanya, tetapi tidak dapat berkembang dan bertumbuh karena tidak memiliki kesempatan dan cenderung dieksploitasi oleh wilayah yang lebih maju. Tingkat kepadatan penduduk yang jarang, kualitas sumber daya manusia yang rendah, tingkat pendapatan yang rendah, tidak memiliki infrastruktur yang lengkap, dan tingkat aksesibilitas yang rendah. Wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, namun tidak berkembang dicirikan oleh tingkat kebocoran wilayah yang tinggi, dimana manfaat tertinggi dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut dinikmati oleh wilayah lainnya.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pengembangan wilayah adalah menyusun perencanaan wilayah. Menurut Tarigan (2006) perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah (termasuk perencanaan pergerakan di dalam wilayah) dan perencanaan kegiatan dalam wilayah diatur dalam perencanaan pembangunan wilayah. Tata ruang wilayah merupakan landasan dan juga sasaran dari perencanaan pembangunan wilayah. Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan sektoral.

Pendekatan sektoral dilakukan dengan mengelompokkan kegiatan pembangunan ke dalam sektor-sektor. Selanjutnya masing-masing sektor dianalisis satu persatu untuk menentukan apa yang dapat dikembangkan atau ditingkatkan dari sektor-sektor tersebut guna lebih mengembangkan wilayah. Pada era otonomi daerah saat ini, salah satu konsep pengembangan wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah pengembangan ekonomi wilayah. Oleh karena itu menurut Tukiyat (2002), konsep pengembangan ekonomi wilayah harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menggali potensi produk unggulan daerah. Secara teoritis strategi pengembangan wilayah baru dapat digolongkan dalam dua kategori strategi, yaitu *demand side strategy* dan *supply side strategy* (Rustiadi et al., 2011).

Strategi demand side adalah suatu strategi pengembangan wilayah yang diupayakan melalui peningkatan barang-barang dan jasa-jasa masyarakat setempat melalui kegiatan produksi lokal, yang bertujuan meningkatkan taraf hidup penduduk. Sedangkan strategi supply side adalah suatu strategi pengembangan wilayah yang diupayakan melalui investasi modal untuk kegiatan produksi yang berorientasi keluar. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk meningkatkan suplai dari komoditi yang pada umumnya diproses dari sumberdaya alam lokal. Strategi pembangunan wilayah lainnya adalah strategi keterkaitan, yaitu terjadi pada suatu wilayah yang dari sisi supply (penawaran/pasokan) relatif tinggi tetapi mempunyai keterbatasan dalam sisi demand atau sebaliknya, maka keterbatasan dan kelebihan dari suatu wilayah dapat dipertemukan sehingga perekonomian wilayah secara keseluruhan dapat meningkat.

Strategi berbasis keterkaitan antar wilayah pada awalnya dapat diwujudkan dengan pengembangan keterkaitan fisik antar wilayah dengan membangun berbagai infrastruktur fisik, seperti jaringan transportasi jalan, pelabuhan, jaringan

komunikasi dan lainnya yang dapat menciptakan keterkaitan sinergis (saling memperkuat) antar wilayah. Keterkaitan fisik saja tidak cukup, harus disertai dengan pengembangan keterkaitan yang lebih luas, yakni disertai dengan kebijakan-kebijakan yang menciptakan struktur insentif yang mendorong keterkaitan yang sinergis antar wilayah. Pengembangan keterkaitan yang tidak tepat sasaran dapat mendorong backwash yang lebih masif yang pada akhirnya justru memperparah ketimpangan dan ketidakberimbangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu keterkaitan antar wilayah yang diharapkan adalah bentuk-bentuk keterkaitan yang saling memperkuat bukan memperlemah.

2.1.3 Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah, ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan faktor yang biasa terjadi. Ketimpangan ini biasanya disebabkan adanya perbedaan tingkat SDA dan faktor-faktor lain yang terdapat pada masing-masing wilayah. Dengan adanya perbedaan tersebut membuat kemampuan wilayah dalam mendorong proses pembangunan juga berbeda.

Karena hal tersebut di atas menurut (Syafrizal, 2008) maka tidaklah mengherankan bila setiap wilayah biasanya terdapat wilayah maju (*Developed Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdeveloped Region*). Terjadinya ketimpangan antar wilayah akan membawa pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah.

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan merupakan suatu fenomena yang terjadi hampir seluruh lapisan negara di dunia, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju, hanya yang membedakan dari semuanya yaitu besaran tingkat ketimpangan tersebut, karenanya ketimpangan itu tidak

mungkin dihilangkan namun hanya dapat ditekan hingga batas yang dapat ditoleransi.

Menurut Neo-klasik, ketimpangan pembangunan wilayah terjadi karena adanya perbedaan sumberdaya, tenaga kerja, dan modal yang dimiliki oleh tiap daerah adalah berbeda-beda. Hipotesis Neo-klasik yang dianalisis oleh Douglas C. North merupakan dasar teoritis utama terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah. Menurut Hipotesis Neo-klasik tersebut pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antarwilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesis ini, dapat disimpulkan sementara bahwa negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf U terbalik (*reverse U-shape curve*) (Syafrizal, 2014).

Hipotesis Neo-klasik ini kembali diteliti oleh Jeffrey G. Williamson (1965) dalam Tambunan (2003). Williamson meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih "matang", dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Artinya, proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan

wilayah, tetapi pada tahap awal pembangunan justru sebaliknya (Harun dan Ghozali, 2012).

Faktor yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah biasanya berupa perbedaan sumber daya alam seperti adanya kandungan alam, minyak dan gas atau tingkat kesuburan lahan antar wilayah satu dengan wilayah lain yang tidak sama. Dengan adanya perbedaan itu membuat kegiatan produksi yang memiliki sumber daya yang bagus lebih efisien dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan yang lain. Sehingga tingkat ekonomi wilayah yang memiliki kondisi wilayah lebih bagus akan lebih cepat berkembang dibandingkan wilayah lain.

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa menurut (Syafrizal, 2008) bisa mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu wilayah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu wilayah tidak dapat dimanfaatkan wilayah lain yang membutuhkan.

Faktor lain yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi dana pembangunan yang berbeda antar wilayah. Bagi wilayah yang mendapat cukup besar dana pembangunan bagi pemerintah maka pertumbuhan ekonominya akan cepat maju, selain dari pemerintah bagi wilayah yang menarik investasi dari swasta cukup besar maka wilayah tersebut kemungkinan mampu mempercepat pertumbuhan ekonominya.

Myrdal (Jhingan 2014), berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab akibat yang membuat mereka yang kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak yang merugikan (*backwash effect*)

cenderung membesar dan dampak yang menguntungkan (*spread effect*) semakin mengecil. Semakin jelas kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di negara-negara terbelakang. Myrdal mendefinisikan dampak yang merugikan (*backwash effect*) sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi suatu ekonomi di suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dampak yang menguntungkan (*spread effect*) menunjuk pada momentum pembangunan yang menyebar secara menyeluruh dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Sebab utama ketimpangan regional menurut Myrdal adalah kuatnya dampak yang merugikan dan lemahnya dampak yang menguntungkan di negara terbelakang.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Menurut Sukirno (2006) “pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi perubahan pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi atau dengan kata lain pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan akan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil tahun bersangkutan dengan PDRB riil tahun sebelumnya (Sukirno, 2006).

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan

jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat, dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang tidak lain adalah faktor produksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Turun naiknya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang tercermin dari kenaikan PDB atau PNB dalam jangka panjang tanpa memandang besar atau kecilnya pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi.

2.1.5 Investasi

Investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran atau belanja yang dapat berupa barang modal, bangunan, peralatan modal, dan barang-barang inventaris yang digunakan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa atau untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga terjadi peningkatan output yang dihasilkan dan tersedia untuk masyarakat. Investasi yang terkonsentrasi hanya di beberapa wilayah akan menjadi salah satu faktor penyebab adanya ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan, hanya wilayah-wilayah yang dinilai mendapatkan profit yang menjanjikan yang akan dilirik oleh para investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri.

Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang mempunyai jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Penanaman modal yang ditanamkan dalam arti sempit berupa proyek tertentu baik bersifat fisik ataupun nonfisik, seperti proyek pendirian pabrik, jalan, jembatan, pembangunan gedung, proyek penelitian, dan pengembangan.

Menurut pendapat Keynes, pada umumnya investasi dilakukan oleh para pengusaha adalah lebih kecil dari jumlah tabungan yang dilakukan rumah tangga pada waktu dicapai penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*), oleh karenanya permintaan agregat dalam perekonomian adalah lebih rendah dari pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kekurangan dalam permintaan agregat ini akan menimbulkan pengurangan penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian (Sukirno, 2008).

Investasi ditentukan oleh efisiensi marjinal investasi modal yang bergantung pada ekspektasi pihak usahawan investor tentang imbalan jasa (laba) yang akan diperoleh di masa yang akan datang dimana harus melebihi bunga dan harus diperhitungkan dalam penggunaan modal. Dalam suasana tertentu, investor kurang berminat melakukan investasi walaupun tingkat bunga rendah akibatnya

ekspektasinya kurang cerah dimasa depan, sebaliknya dalam keadaan ini bisa juga terjadi bahwa pihak investor meningkat permintaannya akan dana modal dan bersedia membayar dengan harga (tingkat bunga) yang terjadi.

Investasi menurut Mankiw (2006) adalah komponen GDP (*Gross Domestic Product*) yang mengaitkan masa kini dan masa depan. Ada tiga jenis pengeluaran investasi, yakni sebagai berikut:

- a. Investasi tetap bisnis (*business fixed invesment*) mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi.
- b. Investasi residensial (*residential invesment*) mencakup rumah baru yang orang beli untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan.
- c. Investasi persediaan (*inventory invesment*) mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan digudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan, barang dalam proses, dan barang jadi.

Kebutuhan akan investasi terus bertambah karena ketidakpastian di masa mendatang akan selalu ada. Seiring dengan berkembangnya zaman instrumen investasi juga semakin beragam. Reksa dana sebagai salah satu instrumen investasi dengan berbagai keunggulan seperti hanya membutuhkan modal relatif sedikit, memiliki ragam jenis sesuai dengan profil risk & return dan dikelola oleh tenaga professional tampaknya dapat menjadi solusi instrumen investasi bagi masyarakat khususnya masyarakat golongan menengah kebawah.

Pada dasarnya tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Berinvestasi pada dasarnya adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Salah satu alasan utama dari berinvestasi adalah mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi dan dorongan untuk menghemat pajak (Tandelilin, 2010). Untuk mencapai suatu efektifitas dan

efisiensi dalam keputusan maka diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Begitupula hal-hal dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

- a. Terciptanya keberlanjutan (*continuity*) dalam investasi tersebut.
- b. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (*profit actual*).
- c. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham.
- d. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.

2.1.6 Pengeluaran Pemerintah

Semua kegiatan pemerintah selalu membutuhkan pembiayaan dan ini didukung oleh penerimaan pemerintah baik yang berasal dari penerimaan rutin maupun penerimaan pembangunan. Demikian pula kegiatan pemerintah dibedakan menjadi kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. (Suparmoko, 2011). Teori pengeluaran pemerintah memiliki dua jenis teori yaitu teori mikro pengeluaran pemerintah dan teori makro pengeluaran pemerintah. Teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah ini mempunyai tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang-barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Pada teori makro pengeluaran pemerintah ada beberapa model yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi seperti, model pembangunan tentang perkembangan pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 2001).

Sukirno (2008) mengemukakan bahwa Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*) adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam APBN dan APBD setiap tahunnya.

Konsep Pengeluaran Pemerintah menurut Keynes merupakan salah satu unsur permintaan agregat. "Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y = C + I + G + X - M$. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah". Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui berapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1996).

Hyman (1996) menjelaskan pengeluaran pemerintah yang didistribusikan dengan daya beli di tengah masyarakat disebut dengan pembayaran transfer pemerintah. Pembayaran transfer ini membuat sumber-sumber pendapatan menyokong pada penerimaan yang tidak mampu menyediakan pelayanan sebagai imbalan dari pendapatan yang diterima kemudian.

Pengeluaran Pemerintah dapat disimpulkan sebagai tindakan maupun kebijakan pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian seperti yang tercermin dalam APBN dan APBD setiap tahun. Pengeluaran pemerintah merupakan unsur agregat sesuai dengan konsep perhitungan pendapatan nasional, dengan membandingkan jumlah pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional dapat diketahui seberapa besar kontribusi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional.

2.1.7 Hubungan antar Variabel

2.1.6.1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Untuk mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, maka perlu diketahui tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan nasional akan menentukan besarnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sering dijadikan patokan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Besarnya pendapatan perkapita sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk, sehingga apabila pertambahan pendapatan nasional lebih besar daripada tingkat pertambahan penduduk, maka tingkat pertambahan penduduk meningkat, begitu juga sebaliknya. Untuk mempertahankan tingkat pendapatan perkapita atau tingkat kesejahteraan relatif, perlu dicapai tingkat pertambahan pendapatan nasional yang sama dengan tingkat pertambahan penduduk (Kuncoro, 2006).

Menurut Kuznets pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2013).

Simon Kuznets dalam Kuncoro (2006) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan atau dari ekonomi pertanian

(tradisional) ke ekonomi industri (modern). Pada awal proses pembangunan ketimpangan pendapatan bertambah besar sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. Namun setelah itu pada tingkat pembangunan yang lebih tinggi atau akhir dari proses pembangunan ketimpangan yakni pada sektor industri sudah dapat menyerap sebagian tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan.

Kuznets mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya, ketimpangan akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi (Todaro, 2013).

Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antardaerah dan antar sektor. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai. Jurang pembangunan dapat mengecil kembali saat daerah yang kaya sudah semakin berkembang (Khusnah, 2015). Ketimpangan tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan terbelakang atau kurang maju. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

2.1.6.2 Hubungan antara Investasi terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan berpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Penyebab gejala ini, menurut

Myrdal ialah peranan bebas kekuatan pasar, yang cenderung memperlebar dibandingkan mempersempit ketimpangan regional (Jhingan, 2014).

Myrdal juga mengemukakan bahwa perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan wilayah. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Jhingan, 2014).

Investasi berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal ini digambarkan dengan semakin banyaknya investasi yang masuk kedalam suatu wilayah akan meningkatkan output yang dihasilkan dan berakhir pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi semakin banyaknya investasi yang masuk ke suatu wilayah justru akan menyebabkan ketidakmerataan (Syafrizal, 2008).

Menurut Myrdal dalam Jhingan (2014) investasi cenderung menambah ketidakmerataan. Di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Selain itu Investasi khususnya investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini, kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah. Perbedaan inilah yang akan menyebabkan ketimpangan antar wilayah menjadi semakin lebar.

Menurut teori Harrod-Domar menjelaskan bahwa pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan

ekonomi. Dalam teorinya, Harrod-Domar berpendapat bahwa pengaruh investasi pada pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka waktu yang lebih panjang. Dapat disimpulkan yakni investasi akan berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan adanya peningkatan atau penurunan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan atau penurunan, seiring dengan peningkatan atau penurunan pertumbuhan tersebut maka akan berpengaruh pada ketimpangan pembangunan. Peningkatan atau penurunan investasi yang saling berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu ketimpangan pendapatan antar daerah (Todaro, 2000).

2.1.6.3 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2006). Todaro (2000) mengatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa “pembayaran transfer” dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan dan sebagainya.

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan tergantung dari pada rencana kegiatan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Apabila porsi dana pengeluaran lebih besar untuk belanja barang dan jasa daripada belanja pegawai maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan perbaikan

pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Peranan pemerintah yang tercermin melalui pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Semakin besar pengeluaran pemerintah akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat menjadi suntikan perekonomian melalui program-program atau kegiatan untuk mendorong produktivitas sumber daya yang ada, sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah (Dhyatmika, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, salah satu dari tujuan Desentralisasi adalah mengoreksi horizontal imbalance, yaitu memperkecil disparitas antar daerah dengan mekanisme block grant/transfer dan memperbesar kewenangan daerah untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki. Dengan diberlakukannya desentralisasi maka daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan pengeluaran pemerintah daerah yang ada dalam APBD. Sesuai dengan peran pemerintah dalam perekonomian, pemerintah memiliki peran stabilisasi, peran alokasi, peran distribusi, dan peran dinamisasi, maka pengeluaran pemerintah daerah harus dilandaskan pada peran-peran tersebut.

Seperti yang diutarakan oleh Sjafrizal (2008) bahwa dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dapat dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang baru di daerah yang berskala kecil, dan kebijakan fiskal wilayah yang mendukung penyelesaian masalah ketimpangan. maka dalam upaya penyelesaian masalah ketimpangan tersebut

diperlukan pengeluaran pemerintah daerah yang sudah terkoordinir yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang berskala kecil.

Hasil penelitian yang dilakukan Sucihati (2014) mengemukakan bahwa semakin besar rasio pengeluaran pemerintah yang ditujukan langsung kepada masyarakat akan meningkatkan pendapatan perkapita yang pada akhirnya mengurangi ketimpangan pendapatan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berkorelasi positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.

2.2 Studi Empiris

Kailei Wei (2007) meneliti hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah di China dengan menggunakan Analisis Regresi dan Indeks Williamson. Penelitian tersebut membuktikan bahwa hubungan variabel investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah di China.

Sasa Abrodovic, dkk (2011) meneliti tentang hubungan pola pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah di 22 Negara OECD dengan menggunakan analisis Indeks Williamson dan Analisis Empiris. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang terhadap ketimpangan ekonomi.

Harun, dkk (2012) meneliti tentang analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah 2007-2011. Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah.

Aulia Urrahman (2012) meneliti tentang analisis ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2006-2010. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa PDRB per kapita berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pembangunan wilayah, Investasi tidak memiliki pengaruh signifikan, namun memiliki hubungan yang negatif terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Sementara Aglomerasi memiliki pengaruh yang signifikan dan hubungan yang negatif terhadap ketimpangan pembangunan wilayah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2013) tentang ketimpangan wilayah Di Provinsi Kalimantan Barat suatu kajian terhadap hipotesis Kuznet. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah. Temuan lainnya membuktikan bahwa hipotesis Kuznet tentang pertumbuhan yang tinggi diiringi juga dengan ketimpangan yang tinggi antar wilayah ternyata tidak berlaku di Provinsi Kalimantan Barat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan wilayah artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka ketimpangan wilayah berkurang demikian sebaliknya. Ini menandakan pertumbuhan ekonomi merupakan syarat perlu untuk membangun daerah tetapi bukan syarat cukup. Karena ada faktor lain yang sangat penting yaitu bagaimana dengan pembangunan tersebut membuat masyarakat daerah menjadi jauh lebih sejahtera dengan meningkatnya pendapatan masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wijang Mahakso (2013) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jambi 2003-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi diperoleh Indeks Williamson berkisar antara 0,36 sampai 0,40 dengan rata-rata yang berarti bahwa ketimpangan yang terjadi antar wilayah

kabupaten/kota di Provinsi Jambi termasuk katagori sedang. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah dan bertanda negatif, Belanja modal dan angka partisipasi sekolah berpengaruh dan bertanda positif terhadap ketimpangan, kemiskinan tidak mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan dan bertanda positif, panjang jalan berpengaruh dan bertanda negatif terhadap ketimpangan. Koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh R-square sebesar 0,9678 mengindikasikan bahwa variasi variabel independen dalam model mampu menjelaskan variasi tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Jambi periode 2003-2010 sebesar 96,78 persen, sisanya sebesar 3,22 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Rosmeli (2015) meneliti tentang dampak investasi dan tenaga kerja terhadap ketimpangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Variabel yang digunakan adalah PMDN, PMA, dan tingkat tenaga kerja dengan menggunakan analisis Indeks Williamson dan analisis regresi. Hasil dari penelitian ini adalah Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia selama tahun 2000-2014 rata-rata sebesar 0,41 dan terus mengalami penurunan. Dari hasil regresi data panel diketahui bahwa PMDN tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan dan mempunyai arah negatif, sedangkan PMA dan TK mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan mempunyai arah positif.

Berdasarkan penelitian Henny A.K Pangkiro, dkk (2016) tentang analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap tingkat ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi jawaban sebagai turunya angka disparitas ekonomi. Tingkat kemiskinan yang meningkat akan memperbesar angka disparitas ekonomi. Ini menjadi tugas pemerintah untuk memperhatikan sektor penyerap tenaga kerja sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi.

Sucihati (2014) Pengaruh Kenaikan Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kalimantan Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan dari berbagai hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi, Investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di daerah tersebut. Faktor inilah yang menjadi syarat penting untuk mengukur ketimpangan yang ada. Ketika Investasi meningkat maka diharapkan mampu mengurangi tingkat ketimpangan yang ada. Pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proposional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan.

2.3 Kerangka Konseptual

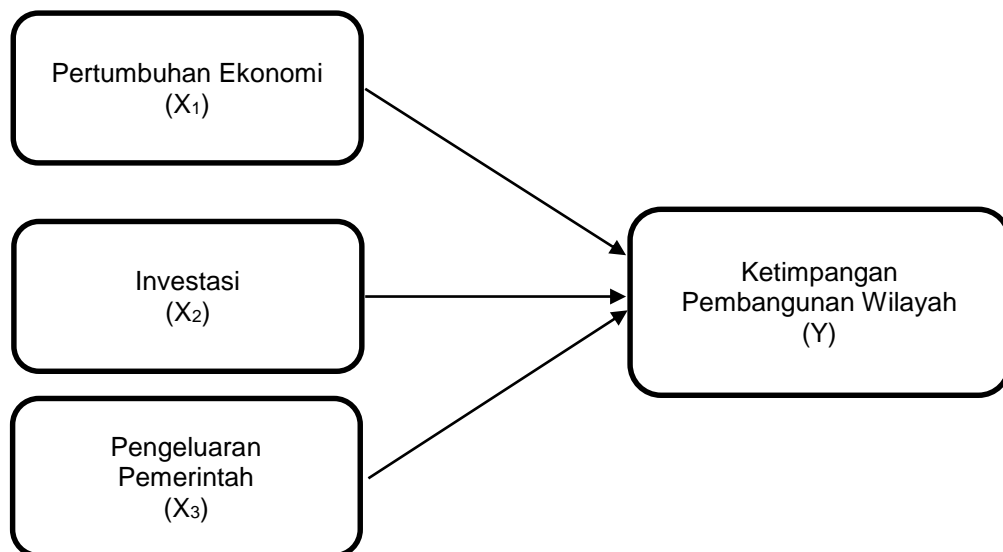
Berbicara tentang ketimpangan maka membahas tentang ketidakmerataan yang berujung pada kemiskinan yang akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan terbagi atas 2 bagian yaitu ketimpangan distribusi pendapatan dan ketimpangan pembangunan. Perbedaan yang paling mendasar antara ketimpangan distribusi pendapatan dan ketimpangan pembangunan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan lebih melihat kepada jarak antara golongan masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin. Sedangkan ketimpangan pembangunan lebih menekankan kepada perbedaan antar wilayah bukan antara

si miskin dan si kaya tetapi perbedaan antar daerah maju dengan daerah terbelakang.

Investasi dan pengeluaran pemerintah merupakan pengaruh yang dianggap memicu terjadinya ketimpangan pembangunan dalam suatu daerah. Investasi yang tinggi diharapkan mampu mengurangi tingkat ketimpangan yang ada dalam daerah tersebut. Disisi lain pada peningkatan investasi setiap tahunnya merupakan gambaran kesejahteraan dalam wilayah tersebut.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat tergantung dari pengalokasian belanja daerah terutama pada program atau kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (kepentingan publik), sehingga dapat mendorong perekonomian yang pada akhirnya akan mengurangi ketimpangan.

Konsep kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Diduga Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.